




Pembahasan RAPBD

Terancam Tertunda

■ FPDIP: Cuti Wali Kota Belum Dapat Izin Menteri


Surat yang kami terima ini hanya melampirkan surat dari Gubernur kepada Dirjen, dan belum ada jawaban dari Dirjen terkait persetujuan izin Haryadi Suyuti ke luar negeri.

YOGYA, TRIBUN - Ketidakhadiran Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dipertanyakan anggota dewan saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2018. Pembahasan RAPBD 2018 pun kemungkinan tertunda. Saat Rapat Paripurna baru saja dimulai, beberapa

anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan ketidakhadiran Wali Kota Yogyakarta. Fraksi PDIP pun mempertanyakan kekuatan dari dokumen yang akan dibahas atau ditandatangani karena Wali Kota Yogyakarta tidak hadir. Ketua Fraksi PDIP Danang Rudiartmoko, misalnya,

● ke halaman 14

Heroe Akui Surat Izin Belum Lengkap

WAKIL Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengakui surat perizinan cuti Wali Kota Haryadi Suyuti yang diberikan kepada DPRD Kota Yogyakarta belum lengkap seluruhnya. "Nanti saat konsultasi dengan anggota dewan kita siapkan secara yuridis terkait sahnya perjalanan dinas yang dilakukan Wali Kota Yogyakarta, sehingga nantinya anggota dewan bisa memahami dan memaklumi ini," ujar Heroe, Rabu (8/11).

● ke halaman 14

Pembahasan RAPBD

● Sambungan Hal 13

mempertanyakan cuti Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ke Jerman selama satu minggu, kemudian seminggu lagi cuti dengan alasan menghadiri acara PBB. Danang juga mempertanyakan terkait dokumen perizinannya.

"Dahulukan yang menyangkut pembangunan Yogyakarta ke depan. Ini melanggar sumpah jabatan. Kami juga mempertanyakan kekuatan dari dokumen

yang disampaikan ini," ungkap Danang, Rabu (8/11).

Pimpinan Fraksi PDIP lainnya Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, segala sesuatu yang menjadi landasan hukum pelimpahan kewenangan belum jelas. Sebab, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 9/2015 yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 tahun 2014, ditegaskan bahwa wali kota yang meninggalkan tugas harus mendapat izin dari menteri.

"Sedangkan surat yang kami terima ini hanya melampirkan surat dari Gu-

bernur kepada Dirjen, dan belum ada jawaban dari Dirjen terkait persetujuan izin Haryadi Suyuti ke luar negeri," ungkap Fokki.

KUA-PAS Ditunda

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Augustinur, menilai rapat paripurna terkait KUA PPAS bisa dilanjutkan karena dihadiri lebih dari setengah anggota, yakni 27 anggota. Sedangkan terkait surat perizinan cuti Wali Kota Haryadi, tidak masalah bila belum mendapat jawaban dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

"Mekanismenya kan sudah dilalui lewat surat pengajuan ke gubernur, sehingga gubernur sudah mengetahui kepergian Wali Kota," jelas Augustinur.

Mengenai hal ini, pimpinan DPRD Kota Yogyakarta akhirnya sepakat untuk menunda pembahasan KUA PPAS RAPBD 2018. Pembahasan dilanjutkan setelah adanya rapat antar pimpinan fraksi di DPRD Kota Yogyakarta, serta rapat konsultasi dengan Pemkot Yogyakarta terkait surat-surat perizinan cuti Wali Kota Haryadi Suyuti. (gil)

Heroe Akui

● Sambungan Hal 13

Terkait tidak hadirnya Wali Kota Yogyakarta bisa mengakibatkan tertundanya pembahasan RAPBD 2018 dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Heroe menegaskan bahwa semua akan sesuai dengan target dan rencana awal.

"Saya yakin teman-teman Dewan punya komitmen untuk menyelesaikannya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat

Yogyakarta, sehingga saya yakin tetap sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya," ungkapnya.

Wali Kota mengambil cuti tahunan melalui surat Permohonan Cuti Tahunan yang ditujukan ke Gubernur DIY dengan surat nomor 85/4172. Cuti tersebut di-

ambil pada 3-9 November. Setelah itu, Wali Kota menghadiri kegiatan Climate Summit of Local and Regional Lead dalam rangkaian acara The 23 United Nation Climate Change Conference di kota Bonn Jerman pada 10-17 November 2017. (gil)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|--------|-----------------|
| 1. | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005